

INTENSIFIKASI PAJAK SARANG BURUNG WALET PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KABUPATEN PELALAWAN (STUDI DI PANGKALAN KERINCI)

Marzioni Wulandari¹ Raden Imam Al Hafis²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau Jl. Kaharuddin
Nasution No.113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia

marzioniwulandari@student.uir.ac.id radenimamalhafiz@soc.uir.ac.id

Abstract

The background of this research is the low compliance of swiftlet nest taxpayers and the suboptimal realization of tax revenues compared to the established targets, which affects the contribution to the region's locally generated revenue (PAD). This study aims to examine the implementation of swiftlet nest tax intensification and identify the inhibiting factors. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The results show that tax intensification efforts are carried out through improvements in tax administration, supervision and inspection, tax education and outreach, as well as law enforcement. However, its implementation still faces obstacles such as low taxpayer awareness, limited personnel resources, and suboptimal data recording and reporting systems. This study recommends enhancing public outreach, transparency, and reforming the tax administration system to improve the effectiveness of swiftlet nest tax intensification in Pelalawan Regency.

Key Words : Tax Intensification, Swiftlet Nest, Regional Revenue Agency (BAPENDA), Local Own-Source Revenue (PAD), Pangkalan Kerinci

Abstrak

Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak sarang burung walet dan belum optimalnya realisasi pajak terhadap target yang ditetapkan, sehingga berpengaruh terhadap kontribusi Pajak Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan intensifikasi pajak sarang burung walet serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya intensifikasi dilakukan melalui perbaikan administrasi perpajakan, pengawasan dan pemeriksaan, edukasi dan penyuluhan pajak, serta penegakan hukum. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti kurangnya kesadaran wajib pajak, keterbatasan sumber daya aparatur, serta sistem pendataan dan pelaporan yang belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi, transparansi, serta pembenahan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan efektivitas intensifikasi pajak sarang burung walet di Kabupaten Pelalawan.

Key Words : Intensifikasi Pajak, Sarang Burung Walet, BAPENDA, Pendapatan Asli Daerah, Pangkalan Kerinci

Pendahuluan

Burung walet adalah burung dengan sayap meruncing, berekor panjang, berwarna hitam dengan bagian bawah tubuhnya berwarna cokelat. Burung walet hidup di pantai serta daerah pemukiman, menghuni gua yang lembab atau ruang besar yang lembab. Habitat burung walet hanya ada di Asia Tenggara. Burung walet sering dijumpai di Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, dan Laos. Burung walet tidak dapat dijumpai di Eropa, Amerika, atau Afrika. Hal ini disebabkan oleh perkembangbiakan burung walet memerlukan iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Karena kelembapan merupakan faktor yang memengaruhi habitat spesies atau populasi burung walet (Wikipedia, 2024).

Dengan kekayaan alamnya yang melimpah, Indonesia memiliki potensi besar untuk industri sarang burung walet. Populasi burung walet yang besar di berbagai wilayah Indonesia, seperti Sulawesi, Jawa, dan Kalimantan, menjadikan sumber utama produksi sarang burung walet. Namun, meskipun potensinya yang besar, sektor ini juga menghadapi sejumlah masalah yang perlu ditangani. Salah satu masalah utama industri sarang burung walet di Indonesia adalah pengelolaan yang tidak teratur, sebagian besar produk sarang burung walet dilakukan secara tradisional, tanpa standar yang jelas atau manajemen yang terstruktur, yang membuat sulit untuk memastikan kualitas dan keamanan produk.

Di Indonesia kelimpahan kewenangan dari kebijakan pemerintah daerah yang dilimpahkan atas dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Bahwasanya terjadi kelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah dalam mengambil berbagai macam kebijakan dan mengelola daerahnya sendiri. Salah satu hal yang diputuskan untuk dibuatnya aturan adalah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).

Di Indonesia sarang burung walet berpotensi menjadi produk ekspor unggulan dan menduduki peringkat pertama sebagai negara eksportir sarang burung walet ke republik rakyat tiongkok sebesar 75,3% hal ini dituturkan langsung oleh menteri dalam negeri saat membuka peluncuran Platform Dagang Digital Indonesia store (IDNStore). Hal ini karena sarang burung walet yang mempunyai banyak manfaat selain untuk kesehatan juga untuk kecantikan oleh karena itu tidak heran jika saat sekarang ini banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan sarang burung walet selain karena potensial juga karena harga sarang burung walet yang tinggi lalu (Sarlis & Hasim As'ari, 2021).

Dasar hukum pemungutan pajak sarang burung walet pada suatu Kabupaten/Kota antara lain; Salah satu Undang-Undang yang dibuat oleh Indonesia perihal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Nomor 1 Tahun 2022, kemudian dilakukan perubahan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat (Insukindro dalam Faisal 2008).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber PAD terdiri dari, Pajak daerah dan Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Tujuan PAD adalah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Harva Yanti, Ibrahim, & Luqman, 2024).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang

dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Maisudu & Wangkar, 2019). Pajak merupakan pemberi kontribusi paling besar bagi penerimaan negara. Di Indonesia Pemerintah membagi pajak menjadi dua berdasarkan wewenang yang memungut atau lembaga pemungutnya agar penerimaan pajak dapat merata yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah (Sarlis & As'ari, 2021).

Intensifikasi pajak adalah strategi yang berfokus pada peningkatan penerimaan dari jenis pajak yang sudah ada dengan cara memperbaiki sistem dan mekanisme pemungutannya, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela maupun melalui pengawasan yang lebih ketat. intensifikasi ini meliputi reformasi dalam bidang regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi sistem teknologi informasi perpajakan, serta kampanye edukasi dan literasi perpajakan kepada masyarakat. Selain itu, integrasi data antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan instansi lain juga menjadi bagian penting dari strategi ini untuk mendeteksi potensi pajak yang belum tergali, termasuk dari sektor sarang burung walet.

Pajak sarang burung walet merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pajak sarang burung walet ada karena adanya usaha budi daya sarang burung walet. Sarang Burung Walet adalah hasil dari air liur burung walet itu sendiri tanpa ada campuran dari air liur burung walet itu sendiri tanpa ada campuran bahan dari luar tubuhnya yang dibuat untuk menyimpan telur dari hasil berkembang biaknya burung walet. Selain itu, pajak sarang burung walet juga diterapkan untuk mengontrol produksi dan menjaga kelestarian populasi burung walet.

Pajak Sarang Burung Walet diberlakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengambilan sarang burung walet secara liar yang dapat mengancam keberlangsungan populasi burung walet. Selain itu, pajak ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pajak Sarang Burung Walet yang sangat berpotensi kini telah menjadi perhatian dan sasaran pemerintah dalam pemungutan pajak sarang burung walet. Mengingat daya jual yang terbilang cukup tinggi, penerapan pajak terhadap sarang burung walet sangat berpotensi dapat membantu pertumbuhan pajak dan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. (Arroziqi & Sulistyowati, 2023).

Kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Pelalawan memiliki peran penting dalam meningkatkan PAD dan mendukung pembangunan daerah. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak sarang burung walet. Upaya-upaya yang dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Pelalawan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi

Administrasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif, efisien, dan rasional (Pasalong 2017). Definisi ini menekankan pentingnya adanya kerjasama dan koordinasi antar individu untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan cara yang optimal. Ini juga menekankan bahwa administrasi memiliki dua dimensi penting, yaitu dimensi karakteristik dan dimensi unsur-unsur. Dimensi karakteristik mengacu pada sifat-sifat yang melekat pada proses administrasi,

sedangkan dimensi unsur-unsur merujuk pada komponen-komponen yang membentuk sistem administrasi itu sendiri.

Konsep Administrasi Publik

Menurut Henry (2017), administrasi publik merupakan kombinasi kompleks antara teori dan praktik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah. Administrasi publik juga berupaya mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Selain itu, administrasi publik berfokus pada pelebagaan praktik-praktik manajemen yang sesuai dengan nilai-nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Konsep Organisasi

Organisasi, menurut Hery (2019), adalah kumpulan orang-orang yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pandangan ini, organisasi tercipta ketika sekelompok individu berusaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Definisi ini menekankan pada pentingnya kolaborasi dan kesamaan tujuan di antara anggota organisasi. Hery menyoroti bahwa tujuan utama dari terbentuknya organisasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, yang biasanya terkait dengan aspek ekonomi, walaupun bisa juga merujuk pada kesejahteraan dalam konteks lainnya.

Konsep Manajemen

Manajemen, menurut Handoko (2021), adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota organisasi serta penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Definisi ini menekankan manajemen sebagai sebuah proses sistematis yang mencakup berbagai fungsi kunci dalam pengelolaan organisasi. Setiap fungsi ini saling terkait dan berperan penting dalam memastikan tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Pengawasan juga merupakan komponen penting dalam manajemen untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai rencana.

Konsep Intensifikasi Pajak

Intensifikasi pajak merupakan kegiatan optimalisasi penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan, pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang telah terdaftar. Intensifikasi pajak mempunyai definisi yang beragam, yaitu sebagai berikut:

Intensifikasi pajak menurut Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE – 06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak adalah sebagai berikut: “Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DPJ, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak”.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Yusuf (2019:329), penelitian kualitatif adalah pendekatan yang fokus pada eksplorasi makna, pemahaman, konsep, simbol, karakteristik, deskripsi, dan gejala yang berkaitan dengan fenomena tertentu.

Penelitian ini bersifat alami dan holistik, menggunakan berbagai metode dan teknik, serta lebih mengutamakan kualitas data. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskriptif atau naratif. Sedangkan menurut Creswell dan Creswell (2021:4) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Hasil dan Pembahasan

Dalam melihat Intensifikasi Pajak Sarang Burung Walet pada BAPENDA Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci, digunakan 4 indikator intensifikasi yaitu perbaikan administrasi perpajakan, pengawasan dan pemeriksaan, penyuluhan dan edukasi pajak, penegakan hukum.

Untuk mendapatkan data mengenai keempat indikator dilakukan observasi dan wawancara. Observasi merupakan proses pengamatan terhadap suatu objek yang dilakukan seseorang dengan memberikan perhatian khusus guna memperoleh fenomena-fenomena yang terlihat. Di dalam penelitian ini tentang Intensifikasi Pajak Sarang Burung Walet Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pelalawan (Studi di Pangkalan Kerinci), terdapat 4 indikator yang akan penulis jelaskan di dalam penelitian ini berdasarkan pendapat (Mardiasmo, 2006). Indikator-indikator yang digunakan penulis dalam penelitian ini, antara lain: Perbaikan Administrasi Perpajakan, Pengawasan dan Pemeriksaan, Penyuluhan dan Edukasi Pajak, Penegakan Hukum. Selanjutnya, untuk melihat hasil dari setiap indikator yang ada, maka setiap indikator akan dibahas, sebagai berikut :

1. Perbaikan Administrasi Perpajakan

Perbaikan administrasi perpajakan merupakan proses pembaharuan dan penyempurnaan dalam sistem pengelolaan perpajakan, yang mencakup berbagai aspek teknis, kelembagaan, dan pelayanan. Dalam konteks ini, perbaikan tidak hanya dimaknai sebagai perubahan teknis, tetapi juga transformasi sistematis yang mencakup penyederhanaan prosedur, digitalisasi layanan, serta peningkatan efisiensi kerja aparat pajak. Hal ini merupakan salah satu bentuk penerapan pada kebijakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sarang burung walet.

Berdasarkan hasil observasi peneliti saat di lapangan, dapat disimpulkan bahwa perbaikan administrasi perpajakan pada pajak sarang burung walet di Kabupaten Pelalawan telah menunjukkan adanya kemajuan melalui sistem digital seperti SIMPADA, Taat Pajak, dan Potensi Pajak. Namun, pelaksanaannya sepertinya masih terkendala oleh rendahnya kesadaran wajib pajak, sulitnya akses terhadap pemilik usaha, dan keterbatasan informasi dari penjaga bangunan. Oleh karena itu, perbaikan administrasi perlu diimbangkan dengan

edukasi yang lebih intensif serta penguatan peran petugas lapangan untuk memastikan data valid dan pemungutan pajak berjalan optimal.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dipaparkan peneliti di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa perbaikan administrasi perpajakan terhadap pajak sarang burung walet di Kabupaten Pelalawan sudah menunjukkan adanya langkah positif, terutama dalam penerapan sistem digital dan pendataan aktif oleh petugas. Namun, efektivitas sistem ini masih sangat dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran wajib pajak, kurangnya pemahaman terhadap kewajiban perpajakan, serta hambatan teknis di lapangan, seperti sulitnya menjangkau pemilik usaha secara langsung.

2. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pengawasan dan pemeriksaan merupakan dua kegiatan yang memiliki peran penting dalam memastikan tercapainya tujuan suatu organisasi atau lembaga. Pengawasan adalah proses pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan, dan standar yang telah ditetapkan. Dan pemeriksaan adalah kegiatan penelaahan atau peninjauan secara mendalam terhadap pelaksanaan suatu kegiatan, yang dilakukan untuk menilai kebenaran, keandalan, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Hasil observasi langsung peneliti di lapangan dapat disimpulkan bahwa ditemukan sejumlah tempat usaha sarang burung walet di Kabupaten Pelalawan masih beroperasi tanpa adanya identifikasi atau penandaan resmi dari pihak BAPENDA. Beberapa bangunan usaha walet bahkan tidak memasang papan nama atau informasi usaha, sehingga menyulitkan proses identifikasi secara cepat oleh petugas. Selain itu, banyak bangunan walet yang dalam kesehariannya tampak tertutup dan tidak memperlihatkan aktivitas mencolok, sehingga terkesan pasif, padahal di dalam ya tetap berlangsung kegiatan produksi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dipaparkan peneliti di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengawasan dan pemeriksaan pajak sarang burung walet oleh BAPENDA Kabupaten Pelalawan telah dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur melalui pemberian surat teguran, koordinasi antar bidang, hingga tindakan persuasif seperti penyegelan. Meskipun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti sulitnya menjangkau pelaku usaha yang berdomisili di luar daerah, serta adanya persepsi keliru dari pelaku usaha terhadap status usaha mereka.

3. Penyuluhan dan Edukasi Pajak

Penyuluhan dan edukasi pajak merupakan dua kegiatan yang saling melengkapi upaya peningkatan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Penyuluhan adalah kegiatan penyampaian informasi atau secara langsung kepada individu atau kelompok masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi mereka terhadap suatu isu atau kebijakan tertentu.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, peneliti menemukan bahwa kegiatan penyuluhan pajak terhadap pengusaha sarang burung walet belum merata. Banyak

pelaku usaha terutama yang lokasi usahanya terpencil atau berbeda domisili, belum pernah menerima sosialisasi langsung dari BAPENDA. Informasi pajak lebih sering diperoleh secara tidak resmi. Penyuluhan yang dilakukan petugas bersifat berhadapan dan terbatas, dengan mendampingi atasan saat kunjungan lapangan atau melalui pertemuan kelompok kecil.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan dan edukasi pajak terhadap pelaku usaha sarang burung walet di Kabupaten Pelalawan masih belum berjalan secara optimal. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh BAPENDA belum bersifat rutin dan belum menjangkau seluruh wajib pajak, terutama mereka yang berada di lokasi terpencil atau berbeda domisili dengan lokasi usaha. Edukasi lebih banyak dilakukan melalui media seperti radio dan himbauan langsung yang bersifat terbatas. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak serta keterbatasan anggaran, data, dan tenaga penyuluh menjadi faktor utama menghambat efektivitas kegiatan ini.

4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses atau upaya untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku ditaati dan dilaksanakan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku ditaati dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat, termasuk oleh aparaturnya.

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, dapat disimpulkan bahwa peneliti menemukan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak sarang burung walet sudah mulai dilaksanakan, terutama melalui pemasangan stiker dan spanduk pada objek pajak yang tidak patuh. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas BAPENDA bersama tim pengawasan dan Satgas Penegakan Perda. Namun, peneliti juga mencatat bahwa dampak dari penegakan hukum tersebut belum sepenuhnya terasa.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dipaparkan peneliti di atas, peneliti menyimpulkan bahwa upaya penegakan hukum oleh BAPENDA terhadap wajib pajak sarang burung walet telah berjalan sesuai prosedur, mulai dari pendekatan pendekatan persuasif, surat teguran, pemasangan stiker, hingga penyegelan objek usaha. Namun, efektivitas upaya tersebut masih belum optimal karena belum menjangkau seluruh usaha, terutama yang berada di wilayah terpencil.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Masalah Intensifikasi Pajak Sarang Burung Walet Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pelalawan (Studi di Pangkalan Kerinci) dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan sudah berjalan namun belum optimal.

Dikarenakan terdapat 4 indikator yang ada dalam intensifikasi pajak sarang burung walet belum berjalan secara maksimal. Di mana indikator Perbaikan Administrasi Perpajakan mulai dibenahi, tetapi masih menghadapi kendala pendataan dan sistem yang belum terintegrasi penuh. Pada indikator pengawasan dan pemeriksaan dilakukan secara bertahap, namun keterbatasan petugas membuat jangkauan belum menyeluruh. Pada penyuluhan dan

edukasi pajak telah dilakukan baik secara langsung maupun media radio, tetapi belum rutin dan belum menjangkau seluruh wajib pajak. Terakhir pada penegakan hukum sudah diterapkan dalam bentuk penyegelan, namun belum dijalankan secara tegas dan merata. Keempat indikator ini menunjukkan perlunya peningkatan strategi dan sumber daya agar intensifikasi pajak dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal :

- Abidin, Z. 2006. Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Proses. Universitas Gadjah Mada. UGM Press
- Afandi. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep Dan Indikator). Yogyakarta: Nusa Media.
- Ali, F. 2019. Teori Dan Konsep Administrasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Azwa, Saifudin. 2019. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, Saifudin. 2019. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. 2017. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Creswell, W. Jhon, and J. David Creswell. 2021. Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. Vol. 53. Fifth Edit. Los Angeles: SAGE Publications, Inc.
- Danim, S. (2007). Manajemen Pendidikan. STIE YKPN.
- Devriza, Ela. A. 2022. Mekanisme Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan.
- Dunn, W. N. 2003. Social Assesment: A Handbook for Practitioners. SAGE Publications.
- Dunn, W. N. 2003. The Evaluation of social Programs. The University of Chicago Press.
- Dunn, W. N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwi, Retno. I. 2022. Efektifitas Peningkatan Pajak Sarang Burung Walet Dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Batang.
- Esterberg, Kristin G. 2019. Qualitative Methods In Social Research. New York: Me Graw Hill.
- Ferwitas, Yesi. S. 2021. Evaluasi Perizinana Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet Di Kabupaten Siak (Studi Kasus Kecamatan Tualang)
- Frohock, F. 1976. Understanding Policy Evaluation. Lexington Books.
- Gitosudarmo, I., and I. Sudita. 2017. Perilaku Keorganisasian. Yogyakarta: BPEE Yogyakarta.
- Hamim, Sufian. 2016. Administrasi Dan Manajemen Pembangunan. 3rd ed. Pekanbaru: UIR Press.
- Handoko, T. Hani. 2021. Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPEE Yogyakarta.
- Harmon, M. M., and R. T. Mayer. 2017. Teori Organisasi Untuk Administrasi Publik. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Hasibuan, Melayu. 2020. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Henry. 2017. Manajemen Kinerja. Jakarta: PT. Grasindo.
- Hery. 2017. Pengantar Manajemen, Yogyakarta: Gava Media.

- Hetzer, E. 2017. *Central and Regional Government*. Jakarta: Gramedia
- Hidayat. 1986. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ibrahim, A. 2008. *Pokok-Pokok Administrasi Publik Dan Implementasinya*. Bandung: Refika Aditama.
- Islamy, M. 1992. *Ilmu Administrasi Negara*. Bumi Aksara.
- Kadir, Abdul. 2020. *Fenomena Kebijakan Dalam Perspektif Administrasi Publik Di Indonesia*. Medan: CV. Dharma Persada Dharmasraya.
- Kriyantono, Rachmat. 2021. *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif Dan Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Maisudu, Reylen, dan Annake Wangkar. 2019. *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa*.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STI, YKPN.
- Maksudi, B. I. 2017. *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi 2006*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marina, Silvia, dan Rizki Syafril. 2024. *Evaluasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet*.
- McMillan, J. H. Schumacher, S. 2015. *Research in Education (Evidence Based Inquiry)*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Miles, B. Matthew, and A. Michael Huberman. 1992. *Qualitative Data Analysis*. 3rd editio. United States of America: SAGE Publications, Inc.
- Moleong, Lexy. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernology : (Ilmu Pemerintahan Baru)*. PT. Rineka Cipta.
- Nugroho D., R. (2008). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pasalong, Harbani. 2017. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Priansa, Donni. 2017. *Manajemen Pelayanan Prima*. Bandung: Alfabeta.
- Putri, Indri Sardianti. 2020. *Optimalisasi Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retrubusi Daerah di Kabupaten Tabalong*. VOL (3):1
- Putri, Ade Rahma. 2019. *Efektivitas Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran (PBB-P2) Oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Robbins, Stephen P., and Timothy A. Judge. 2019. *Organizational Bathavior 13th ed*, London: Pearson Edition.
- Sarlis, Hasim, dan As'ari. 2021. *Implementasi Kebijakan Pajak Daerah Di Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus Pada Pajak Sarang Burung Walet)*.
- Siagian, P. Sondang. 2015. *Organisasi, Kepemimpinan Dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Siagian, Sondang P. 2018. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Siswanto, Sastrohadiwiryono. 2021. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrative Dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Graha Ilmu.

- Sulmayani, Achmad, dan Ruslan Hambali. 2020. Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet: Telaah Kontekstual. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*. Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, I. K. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafri, Wirman. 2017. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Syamsi, I. 2018. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Tangkilisan. (2003). *Manajemen Publik*. PT. Rineka Cipta.
- Widjaja, A. W. 2015. *Administrasi Publik*. Jakarta; Rajawali Press.
- Widodo, Joko. 2021. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Winardi, J. 2021. *Manajemen Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yusuf, A. Muri. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Zulkifli. 2016. *Pengantar Studi Administrasi Dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public*

- Administration Review, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).

- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*. Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Mulianto, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024).

PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.

- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru).

- Jurnal Wacana, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten

- Kampar. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".